

BAB 2

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini kan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian Analisis Isi Kredibilitas Media dalam Pemberitaan mengenai Muktamar Muhammadiyah 2010 dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Sebelum memasuki analisa hasil penelitian, peneliti akan memberikan gambaran sekilas tentang SKH Kedaulatan Rakyat.

A. Berita mengenai Muktamar Muhammadiyah 2010 dalam SKH Kedaulatan Rakyat

Pada saat peristiwa Muktamar Muhammadiyah 2010 berlangsung di Yogyakarta tanggal 2-8 Juli 2010, berbagai media baik media elektronik maupun media cetak ramai-ramai memberitakan mengenai peristiwa ini. Salah satu media yang secara besar-besaran memberitakan mengenai Muktamar Muhammadiyah 2010 ini adalah SKH Kedaulatan Rakyat.

SKH Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu media yang berpengaruh di wilayah Yogyakarta, mempunyai peran yang sangat besar dalam menyebarkan berita kepada masyarakat. Tema-tema yang diangkat oleh SKH Kedaulatan Rakyat merupakan peristiwa-peristiwa aktual dan hangat yang mengemuka di dalam masyarakat baik isu lokal, nasional, maupun internasional.

Selama peristiwa Mukhtar Muhammadiyah 2010 ini berlangsung, SKH Kedaulatan Rakyat memberikan perhatiannya secara khusus untuk meliput peristiwa ini. SKH Kedaulatan Rakyat membentuk tim liputan yang ditugaskan di berbagai titik tempat berlangsungnya Mukhtar Muhammadiyah 2010 ini.

Mukhtar Muhammadiyah 2010 ini adalah peristiwa yang langka karena sekaligus merupakan peringatan 100 tahun berdirinya Muhammadiyah. Selain itu dalam Mukhtar Muhammadiyah juga akan dipilih pengurus-pengurus baru Muhammadiyah periode 2010-2015.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan redaktur pelaksana SKH Kedaulatan Rakyat tanggal 23 November 2010, SKH Kedaulatan Rakyat memberitakan kurang lebih 163 berita mengenai Mukhtar Muhammadiyah 2010 selama peristiwa ini berlangsung. Adapun wartawan yang menjadi tim khusus untuk meliput peristiwa ini antara lain : Ahmad Lutfie, Soeparno S Adhy, Fadmi Sustiwi, Aksan Susanto, Syaiful Nur Ikhwan, Sukro Riyadi, Dian Ade Permana, Riyana Ekawati, Anik Puspitosari, dan Rahajeng Kartika AP sebagai reporter, serta Franz Boedisukarnanto, Effy WP, Surya Adi Lesmana, dan Bambang Nurcahaya sebagai fotografer.

SKH Kedaulatan Rakyat menampilkan pemberitaan mengenai Mukhtar Muhammadiyah 2010 tersebut ke dalam *headline*, berarti fokus pemberitaan dari media tersebut adalah mengenai peristiwa Mukhtar Muhammadiyah 2010. Fokus pemberitaan dari sebuah media selalu berubah-ubah sesuai

dengan peristiwa aktual dan hangat dengan berbagai tema yang diangkat sesuai dengan kebijaksanaan dari redaksi.

B. Permasalahan dalam Muktamar Muhammadiyah 2010

Agenda utama dalam Muktamar Muhammadiyah 2010 yang diadakan pada tanggal 3-8 Juli 2010 lalu adalah menghasilkan putusan-putusan Muktamar Muhammadiyah yang amanat dan pemilihan ketua umum baru dan 12 formatur yang akan menyusun kepengurusan baru Pemuda Muhammadiyah, serta arah bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan perjalanan Muhammadiyah periode 2010-2015.

Pada hari Rabu, 7 Juli 2010, dalam sidang Muktamar Muhammadiyah dengan agenda pemilihan ketua umum Muhammadiyah, akhirnya 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 sepakat memilih kembali Prof. Dr. Din Syamsuddin sebagai ketua umum. Ini merupakan kepemimpinan periode kedua bagi Din Syamsuddin.

Dengan terpilihnya kembali Din Syamsuddin sebagai ketua umum, berarti tidak ada kejutan dalam 100 tahun Muktamar Muhammadiyah kali ini. Seperti kebiasaan Muktamar Muhammadiyah selama ini, figur yang dipilih dengan perolehan suara terbanyak memang memiliki kesempatan terbesar untuk memegang tampuk pimpinan ormas Islam tersebut. Figur ketua umum bukan sekedar untuk memimpin. Namun ketua umum sekaligus sebagai simbol organisasi, sehingga pasti akan memiliki peran besar untuk memberi warna bagi gerak Muhammadiyah terutama secara eksternal.

Setelah melalui proses pemungutan suara, organisasi di bawah naungan Muhammadiyah yaitu Aisyiyah akhirnya berhasil menentukan lima orang figur sebagai formatur pembentukan anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah 2010-2015. Lima kandidat formatur Pimpinan Pusat Aisyiyah itu adalah Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno yang juga ketua umum lama, Dra. Siti Noordjannah Djohantini MM MSi, Dra. Shoimah, Prof. Dr. Masyitoh M.Ag, dan Dra. Dyah Siti Nur'aini.

Sebagai formatur, maka lima kandidat Pimpinan Pusat Aisyiyah tersebut akan bersidang pada hari Rabu, 7 Juli 2010, guna menentukan delapan orang tambahan sehingga jumlahnya menjadi 13 orang yang kemudian akan ditetapkan sebagai anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah 2010-2015.

Selanjutnya, 13 orang tersebut akan melakukan sidang guna memilih ketua umum dan sekretaris umum. Setelah ditetapkan, akan dilakukan serah terima jabatan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru Pimpinan Pusat Aisyiyah.

Meski 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah terpilih, bahkan telah ditetapkan Prof. Din Syamsuddin kembali menjadi ketua umum dan Agung Danarta sebagai sekretaris umum, namun persoalan keterwakilan perempuan di ormas Islam itu belum juga jelas.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Aisyiyah sempat melayangkan protes dengan nota keberatan kepada panitia pemilihan dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena dari 39 orang calon tetap anggota Pimpinan Pusat

Muhammadiyah 2010-2015 tidak ada seorang pun wakil perempuan. Nota keberatan itu pun ditandatangani oleh 33 pimpinan wilayah Aisyiyah.

Namun, hingga ketua dan sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 terpilih secara definitif, kabar nota keberatan dari Pimpinan Pusat Aisyiyah itu tak terdengar lagi. Meski sempat berembus isu akan ada penambahan jumlah anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun kabar itu pun juga tak ada tindak lanjutnya.

C. Deskripsi Media

- **Nama Surat Kabar** : Kedaulatan Rakyat
- **Jenis** : Surat Kabar Harian
- **Surat Ijin Penerbitan Pers** : SIUPP No. 127/SK/ MENPEN/A.7/1986
- **Alamat Redaksi** : Jalan Mangkubumi 40-42
Yogyakarta, 55232
- **Hari Terbit** : Senin-Minggu (Setiap hari)
- **Ukuran Halaman** : 58 cm x 38 cm
- **Jumlah Halaman** : 24 Halaman
- **Penerbit** : PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

1. Sejarah Singkat SKH Kedaulatan Rakyat

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar harian tertua di daerah Yogyakarta dan masih bertahan hingga saat ini. SKH Kedaulatan Rakyat pertama kali terbit tanggal 27 September 1945 di Yogyakarta,

tepat 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki ijin yakni SIUPP No.12/SK/MENPEN/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Pendiri SKH Kedaulatan Rakyat adalah H. Samawi (1913-1984). Dan para penerusnya, yaitu Dr. H. Soemadi M. Wonohito, SH dan Drs. M. Idham Samawi yang merawat dan melanjutkan perjuangan para pendiri SKH Kedaulatan Rakyat. Hingga saat ini SKH Kedaulatan Rakyat dipimpin oleh :

Direktur Utama	: Drs. HM Romli
Direktur Pemasaran	: Fajar Kusumawardhani, SE
Direktur Keuangan	: Bahtanisyar Basyir, SE
Direktur Produksi	: Sugeng Wibowo, SH
Direktur Litbang	: HM Wirmon Samawi, SE. MIB
Pemimpin Umum	: Drs. HM Romli
Pemimpin Redaksi	: Drs. Octo Lampito, M.Pd
Wakil Pemimpin Redaksi	: Drs. Ahmad Luthfie MA Ronny Sugiantoro, SPd. SE. MM
Redaktur Pelaksana	: Mussahada Drs. Hudono SH Joko Budiarto
Manajer Litbang Diklat Redaksi	: Wismoko Poernomo
Manajer Produksi Redaksi	: Ngabdul Wakid
Sekretaris Redaksi	: Dr. Hj Supriyatin

Fotografer : Yuwono

Effy Widjono Putro

Menurut Mr. Soedarisman Poewoekoesoemo, *KR* merupakan koran pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka. Penerbitan perdana SKH Kedaulatan Rakyat dimulai tanggal 27 September 1945 dengan mencetak sebanyak 2000 ekslembar dengan *headline* “Kekoeasaan Pemerintah Daerah Jang Seloeroehnya di Tangan Bangsa Indonesia”. Namun sekarang tiras SKH Kedaulatan Rakyat per harinya berjumlah sekitar 110.000 ekslembar. Logo SKH Kedaulatan Rakyat pun masih dengan menggunakan huruf kapital tegak. Pada akhir tahun 1947 mulai menggunakan logo dengan huruf kursif dan ejaan lama. Logo tersebut diciptakan dalam suasana perjuangan. Tahun 1972 disesuaikan dengan berlakunya ejaan yang disempurnakan (EYD).

Dalam dinamika perjuangan yang begitu itulah, SKH Kedaulatan Rakyat hadir sebagai penyaji informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. SKH Kedaulatan Rakyat berusaha untuk tetap eksis. Selama tahun 1945-1948, SKH Kedaulatan Rakyat tidak hanya bergulat dengan bangsa Indonesia, tapi juga dengan dirinya sendiri. Situasi yang ada, baik ekstern maupun intern menjadikan SKH Kedaulatan Rakyat untuk sementara waktu mengalihkan perjuangan dari penyaji informasi berwujud koran yang hadir secara setia kepada pembaca ke pendukung perjuangan fisik bangsanya yang sedang berperang melawan penjajah dalam bentuk selebaran. Sejak tahun 1950 SKH Kedaulatan Rakyat mengarah ke

profesionalisasi usaha dengan upaya mencari keuntungan meskipun demikian bukan berarti sifat perjuangannya ditinggalkan dan ditanggalkan.

Dinamika perkembangan SKH Kedaulatan Rakyat ini, telah bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga dalam perjalanannya, SKH Kedaulatan Rakyat telah menerbitkan dua media baru yaitu Minggu Pagi dan Koran Merapi dalam naungan Kedaulatan Rakyat Group.

Berdasarkan motto SKH Kedaulatan Rakyat yaitu “Amanah Hati Nurani Rakyat”, menunjukkan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat membawa amanat rakyat yang mewakili suara hati nurani rakyat. Selain itu SKH Kedaulatan Rakyat juga meningkatkan pengetahuan rakyat dengan menyampaikan informasi kepada rakyat. Kebijakan redaksional di SKH Kedaulatan Rakyat adalah independen yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak. Disarankan bagi para wartawan dalam menuliskan berita mampu seimbang. Tidak dengan memihak pada salah satu narasumber saja.

Sampai Maret 2007, tiras surat kabar ini diperkirakan mencapai hampir 200.000 ekslembar per hari, dengan peredaran terluas di Yogyakarta sekitar 160.000 ekslembar, Jawa Tengah 33.000 ekslembar, dan daerah lain 17.000 ekslembar. Adapun deskripsi umum dari profil pembaca SKH Kedaulatan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Dari sisi usia dibaca oleh pembaca yang berusia antara 20-46 tahun, dengan komposisi terbesar pada rentang usia 21-25 tahun sebanyak 33% dan 31-40 tahun sebanyak 30%.
- Dari sisi tingkat pendidikan, dibaca oleh pembaca dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 44%, Sarjana 37%, dan Diploma 13%.
- Berdasarkan pekerjaan, didominasi secara merata oleh pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, dan para pengusaha. (Bharata, 2008 : 21).

2. Visi SKH Kedaulatan Rakyat

Perjuangan SKH Kedaulatan Rakyat dalam mempertahankan amanat dan suara hati nurani rakyat tak hanya melalui sebuah media dengan menyebarkan lembaran-lembaran berita ke seluruh penjuru daerah, tetapi bentuk perjuangan itu juga melalui usaha untuk menciptakan kedekatan dengan rakyat bawah. SKH Kedaulatan Rakyat berjuang membawa aspirasi dan menyentuh kebutuhan lapisan bawah sehingga melahirkan komitmen dan kepercayaan yang kuat.

Menyebarkan informasi yang benar dan berimbang dengan cepat memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Untuk menjadi berguna (*Migunaning Tumraping Liyan*), membangun bersama (*Bebarengan Mrantasi Gawe*), dan membawa terang bagi kehidupan (*Urip Sejatine Gawe Urup*) sehingga SKH Kedaulatan Rakyat hidup di dalam realitas sosial mereka, adalah suatu perjuangan yang berat. Dikawal oleh armada

yang handal, SKH Kedaulatan Rakyat berusaha menjadi tolak ukur dan sumber inspirasi bagi hidup dan perjuangan rakyat. SKH Kedaulatan Rakyat lahir sebagai hasil perjuangan rakyat yang diteruskan sampai kapan pun juga.

3. Misi SKH Kedaulatan Rakyat

Menyajikan informasi yang aktual bukanlah hal mudah di saat ini, maka dari itu SKH Kedaulatan Rakyat berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembacanya. Untuk memenuhi selera para pembaca, SKH Kedaulatan Rakyat berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh para pembacanya karena SKH Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya terdiri dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya.